



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UPAYA MENJAGA MOMENTUM EKSPANSI PMI MANUFAKTUR INDONESIA

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi

Analisis Legislatif Ahli Pertama

muhammad.zanggi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian untuk menganalisis kondisi sektor industri manufaktur. PMI manufaktur Indonesia mencerminkan kinerja sektor industri pengolahan di Indonesia, di mana angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sedangkan di bawah 50 menandakan kontraksi. Selama beberapa bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Namun, laporan *Standard & Poor's (S&P) Global* pada Agustus 2025 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan PMI manufaktur Indonesia mencapai 51,5—naik 2,3 poin dari bulan Juli yang berada di level 49,2. Kenaikan ini menandai kembalinya sektor manufaktur ke fase ekspansi setelah lima bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sebesar 18,89% pada tahun 2024. Oleh karena itu, menjaga momentum ekspansi ini menjadi sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Secara teknis, peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 didorong oleh lonjakan pesanan baru yang naik 4,0 poin dari 48,3 pada Juli menjadi 52,3. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pesanan ekspor yang naik 2,8 poin ke angka 51,2 yang menunjukkan permintaan yang lebih tinggi dari pasar internasional. Aktivitas produksi juga mengalami peningkatan signifikan dari 49,0 menjadi 52,6 atau naik 3,6 poin yang mengindikasikan kapasitas produksi kembali ke zona ekspansif. Perusahaan mulai merekrut lebih banyak tenaga kerja, tercermin dari indeks ketenagakerjaan yang naik ke 50,4. Aktivitas pembelian bahan baku pun meningkat, dengan indeks pembelian naik 3,1 poin ke 51,6. Perbaikan lainnya terlihat pada stok pembelian yang naik 2,2 poin ke 51,1 serta waktu pengiriman pemasok yang membaik ke angka 50,0. Selain itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 53,55 meningkat 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan PMI manufaktur Indonesia dan IKI secara bersamaan mengonfirmasi bahwa sektor industri manufaktur sedang berada dalam fase ekspansi.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa kenaikan PMI manufaktur Indonesia mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menjadi bukti bahwa industri manufaktur nasional tetap tangguh di tengah dinamika politik dan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Industri manufaktur memiliki ekosistem yang luas dan saling terkait, mencakup keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*), investasi, Upah Minimum Regional (UMR), bahan baku, logistik, hingga sumber daya energi. *Backward linkage* merujuk pada ketergantungan suatu industri terhadap sektor lain sebagai pemasok *input* produksi, sedangkan *forward linkage* berarti hasil produksi suatu industri menjadi *input* bagi sektor hilir.

Kementerian Perindustrian berkomitmen menjaga kelancaran seluruh rantai entitas industri agar optimisme dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Stabilitas nasional menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan tren positif ini. Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri nasional melalui hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kementerian Perindustrian juga tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor manufaktur, dan pengembangan kawasan industri berbasis teknologi. Langkah-langkah ini diyakini akan mempercepat transformasi Indonesia menjadi pusat pertumbuhan industri di kawasan maupun dunia, sekaligus menjaga momentum ekspansi yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Atensi DPR

Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan sektor industri manufaktur nasional melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai mitra Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR RI merumuskan regulasi yang mendukung iklim usaha kondusif, termasuk kebijakan hilirisasi, perlindungan produk dalam negeri, dan insentif fiskal. Dalam fungsi anggaran, Komisi VII DPR RI perlu memastikan alokasi APBN yang memadai untuk program prioritas seperti pengembangan kawasan industri berbasis teknologi, peningkatan kualitas SDM industri, dan digitalisasi produksi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mengawal pelaksanaan kebijakan agar berdampak nyata terhadap daya saing industri. Komisi VII DPR RI juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku industri, menyerap aspirasi dunia usaha, serta memberikan masukan konstruktif dalam perumusan kebijakan berkelanjutan. Sinergi antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian Perindustrian menjadi kunci menjaga momentum ekspansi sektor manufaktur sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri Indonesia.

Sumber

Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2025;
ekonomi.bisnis.com, 4 September 2025;
ekonomi.republika.co.id, 2 September 2025;
industri.kontan.co.id, 1 & 2 September 2025; dan
mediaindonesia.com, 4 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*